



IMPLEMENTASI SPM DAN PENGANGGARANNYA (FOKUS PADA ISU PRIORITAS)

Kementerian Kesehatan R.I

HUBUNGAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENERAPAN SPM

Urusan Wajib



UU 23/2014
PASAL 12, PASAL 18 DAN
PASAL 298



Pelaksanaan SPM



PP No.2 Tahun 2018 TTg
Standar Pelayanan Minimal



Mekanisme dan Strategi Penerapan



Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No 100/2018
tentang Penerapan SPM

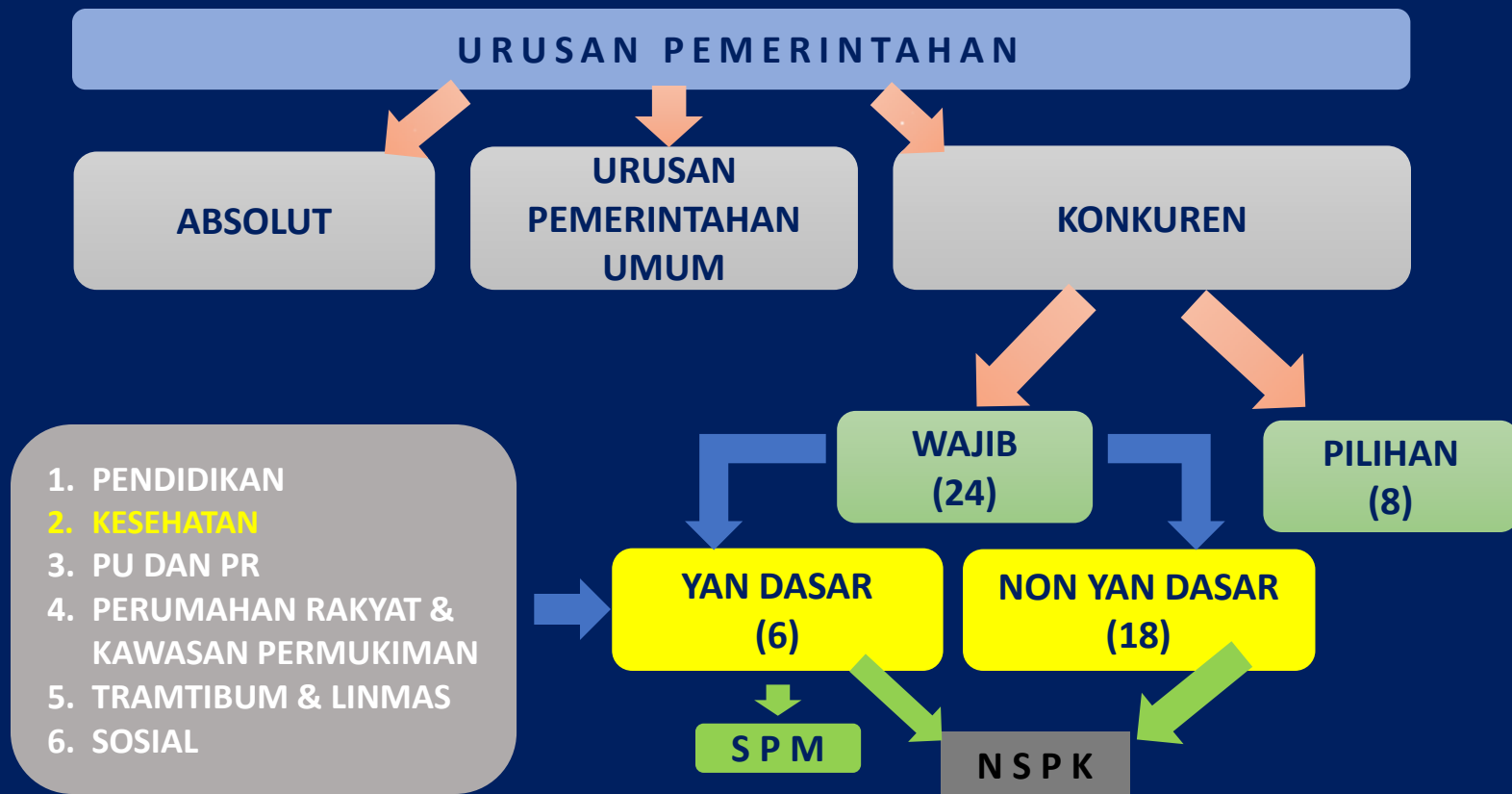


Mekanisme Pemenuhan & Mutu SPM Kes



PERMENKES No 4/2019 Tentang Standar Teknis
Penerapan SPM Bid Kesehatan

UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

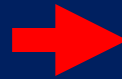


URUSAN PEMERINTAHAN



PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN KESEHATAN

- UPAYA KESEHATAN
- SDM KESEHATAN
- SEDIAAN FARMASI, ALKES, MAKANAN DAN MINUMAN
- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Pusat

Provinsi

Kabupaten/Kota

**PERMASALAHAN
KESEHATAN**

**PENINGKATAN
PELAYANAN
KESEHATAN**

**PEMENUHAN
SARPRAS YANKES**

**PEMENUHAN
SDM**

**PEMENUHAN
FARMALKES**

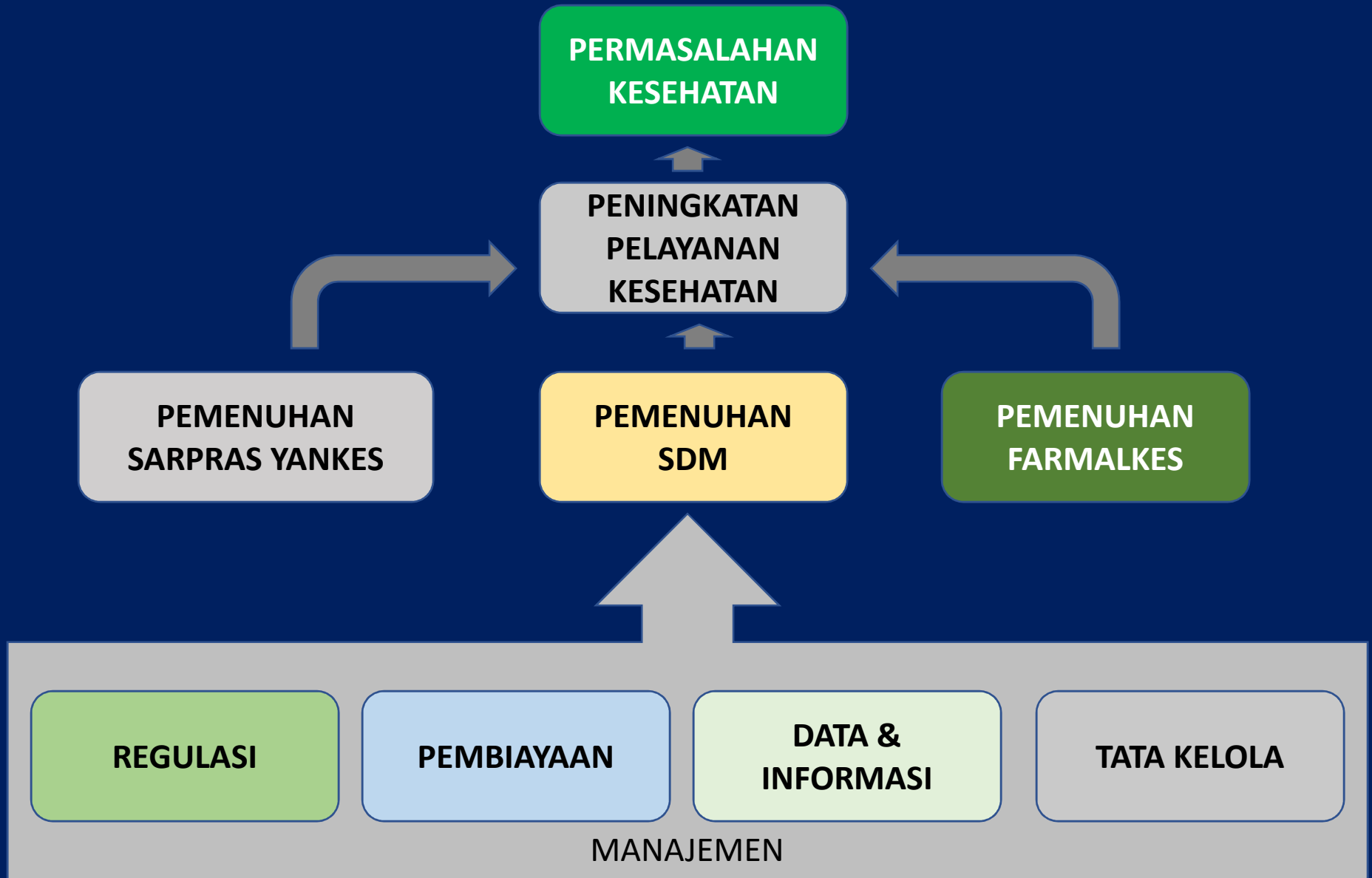
REGULASI

PEMBIAYAAN

**DATA &
INFORMASI**

TATA KELOLA

MANAJEMEN



SPM Bidang Kesehatan

- Adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yg merupakan urusan pemerintahan yg wajib yg berhak diperoleh setiap warga Negara
- Fungsi SPM Bidang Kesehatan:
 - Fasilitasi Pemda utk melakukan pelayanan publik yg tepat bagi masyarakat
 - Sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan
- Bagian integral dari visi dan misi kepala daerah
- Dasar prioritas belanja daerah dan alokasi dana pusat (DAK)

PERUBAHAN PERMENKES TENTANG SPM

PERMENKES NO 43 TH 2016

1. JENIS LAYANAN DAN MUTU SPM : 12 Jenis layanan mutu kab/Kota
2. MUATAN MATERI: Berisi petunjuk teknis

Merupakan kinerja program Kesehatan

PERMENKES NO 4 TH 2019

1. JENIS LAYANAN DAN MUTU :
 - 2 Jenis Layanan dan Mutu Propinsi
 - 12 Jenis Layanan dan Mutu Kab/Kota
2. MUATAN MATERI (STANDAR TEKNIK MUTU TIAP LAYANAN)
 - Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa
 - Standar jumlah dan kualitas personil/SDM
 - Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Merupakan kinerja Pemerintah Daerah

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROV, KAB/KOTA BIDANG KESEHATAN

PELAYANAN DASAR PADA SPM KESEHATAN PROVINSI

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

PELAYANAN DASAR PADA SPM KESEHATAN KAB/KOTA

SIKLUS HIDUP

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil*)
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin*)
3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir *)
4. Pelayanan Kesehatan Balita *)
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

PENYAKIT TIDAK MENULAR

1. Pelayanan Kesehatan DM *)
2. Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat
3. Pelayanan Kesehatan Hipertensi *)

PENYAKIT MENULAR

1. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis *)
2. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV

PERMENKES No 4/2019 TENTANG SPM BIDANG KESEHATAN

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan	Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a. Barang b. Jumlah c. Fungsi	Jenis Tenaga Kesehatan	a.Pernyataan Standar b.Pengertian c.Mekanisme Pelayanan d.Capaian Kinerja e.Teknik Penghitungan Pembiayaan

PENERAPAN SPM KESEHATAN

PENERAPAN SPM

01

Mengingat SPM adalah penyediaan kebutuhan dasar secara minimal bagi warga negara, maka seluruh warga negara penerima harus memperolehnya pelayanan minimal bidang kesehatan (100 %).

02

Dalam hal ketersediaan layanan tersebut belum mencapai 100 %, maka dalam evaluasi SPM dinyatakan daerah tersebut "belum memenuhi capaian SPM".

03

Dalam penganggaran pemenuhan SPM hendaknya tidak boleh dibatasi oleh anggaran (*unconstrain budget*). Dengan demikian penganggaran SPM harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum memenuhi anggaran lainnya.

PERAN PUSAT DALAM SPM



PERAN PROPINSI DALAM SPM (PERMENDAGRI 100/2018)

Menyusun rencana aksi penerapan SPM

Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam sosialisasi Standar Teknis dan Penerapan SPM di daerah Prov

Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat

Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM

Mengoordinasikan :

- Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data secara periodik
- Integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
- Perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Prov
- Pemantauan dan evaluasi SPM di daerah Prov/Kab/kota
- Pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemda Prov

Mengkonsolidasikan :

- Sumber pendanaan dalam pemenuhan anggaran untuk penerapan SPM Prov
- Laporan penerapan dan pencapaian SPM Prov

PERAN KAB/KOTA DALAM SPM

(PERMENDAGRI 100/2018)

Menyusun rencana aksi penerapan SPM

Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM

Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat

Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM

Mengoordinasikan :

- Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data secara periodik
- Integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
- Perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Kab/Kota
- Pemantauan dan evaluasi SPM di daerah Kab/kota
- Pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemda Kab/kota

Mengkonsolidasikan :

- Sumber pendanaan dalam pemenuhan anggaran untuk penerapan SPM Kab/Kota
- Laporan penerapan dan pencapaian SPM Kab/Kota.

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE	Minimal 2 per puskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar
2	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	Mengukur tekanan darah
3	Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi:

- Dokter, atau
- Bidan, atau
- Perawat
- Tenaga kesehatan masyarakat

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pengukuran Tekanan Darah	Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten atau tenaga kesehatan lain yang terlatih
2	Edukasi	Dokter dan/ atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
3	Terapi farmakologi	Dokter

CONTOH: HIPERTENSI

Juknis/ Tata Cara Pemenuhan Standar:

- Pernyataan standar
- Pengertian
- Mekanisme pelayanan
- Capaian kinerja
 - Definisi Operasional
 - Rumus perhitungan

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

=

X 100%

Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

- Teknik Perhitungan Pembiayaan

TAHAPAN PENERAPAN SPM

→ TIM PENERAPAN SPM

PENGUMPULAN DATA

- ✓ jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima
- ✓ jumlah barang dan/atau jasa yg sudah tersedia dan yg dibutuhkan
- ✓ jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELDAS

- ✓ RPJMD dan RKPD
- ✓ Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

- ✓ menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima
- ✓ Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya

PELAKSANAAN PEMENUHAN

- ✓ Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM
- ✓ Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU



M&E DAN PELAPORAN

- M&E pelaksanaan SPM dilakukan setiap 3 bulan dan dilakukan secara berjenjang menurut tataran tanggung jawab wilayah kerja yakni Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota serta Provinsi
- Pelaporan SPM bidang kesehatan termasuk bagian dari materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Materi muatan laporan penerapan SPM bidang kesehatan memuat:
 - Hasil penerapan SPM
 - Kendala penerapan SPM dan
 - Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPM

- Mendagri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara umum;
- Menteri kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang kesehatan Daerah Provinsi secara teknis;
- Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM bidang kesehatan Provinsi oleh OPD provinsi; dan selaku wakil pemerintah pusat melakukan pengawasan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota secara umum dan teknis;
- Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota oleh OPD Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administrative yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

PENGANGGARAN & SISTIM COSTING BIAYA KESEHATAN (SISCOBIKES) UNTUK SPM KESEHATAN

DASAR PENYUSUNAN NOMENKLATUR PROKEGDA

**UU No 23/2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lamp)**



**Rancangan revisi PP 38/2007
Ttg Pembag Urusan Konkuren**



**PP 12/2018 Sebagai pengganti
PP 58/2005**



**Rancangan revisi Permendagri 13/2006
(Nomenklatur Prokegda)**

R-PERMENDAGRI TTG NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENGANTI PERMENDAGRI 13/2006 (LAMPIRAN III)

KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI PROPINSI

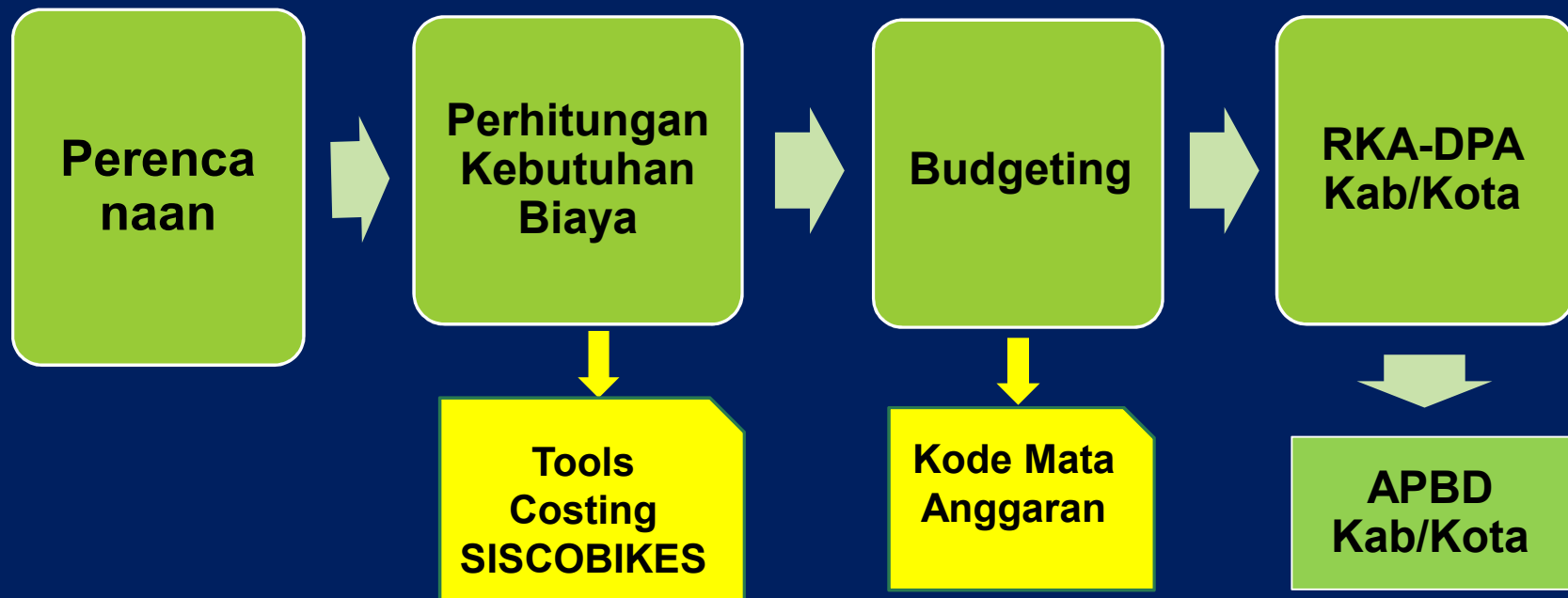
KODE					URUSAN/ <i>BIDANG</i> URUSAN/PROGRAM/ Kegiatan
					PROVINSI
01					URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SPM BIDANG KESEHATAN
01	02				KESEHATAN
01	02	xx	02		PROGRAM UKM RUJUKAN
01	02	xx	02	1	Penyediaan fasilitas kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
01	02	xx	02	2	Penyediaan fasilitas Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
					Dst....
					PROGRAM Dst.....

KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

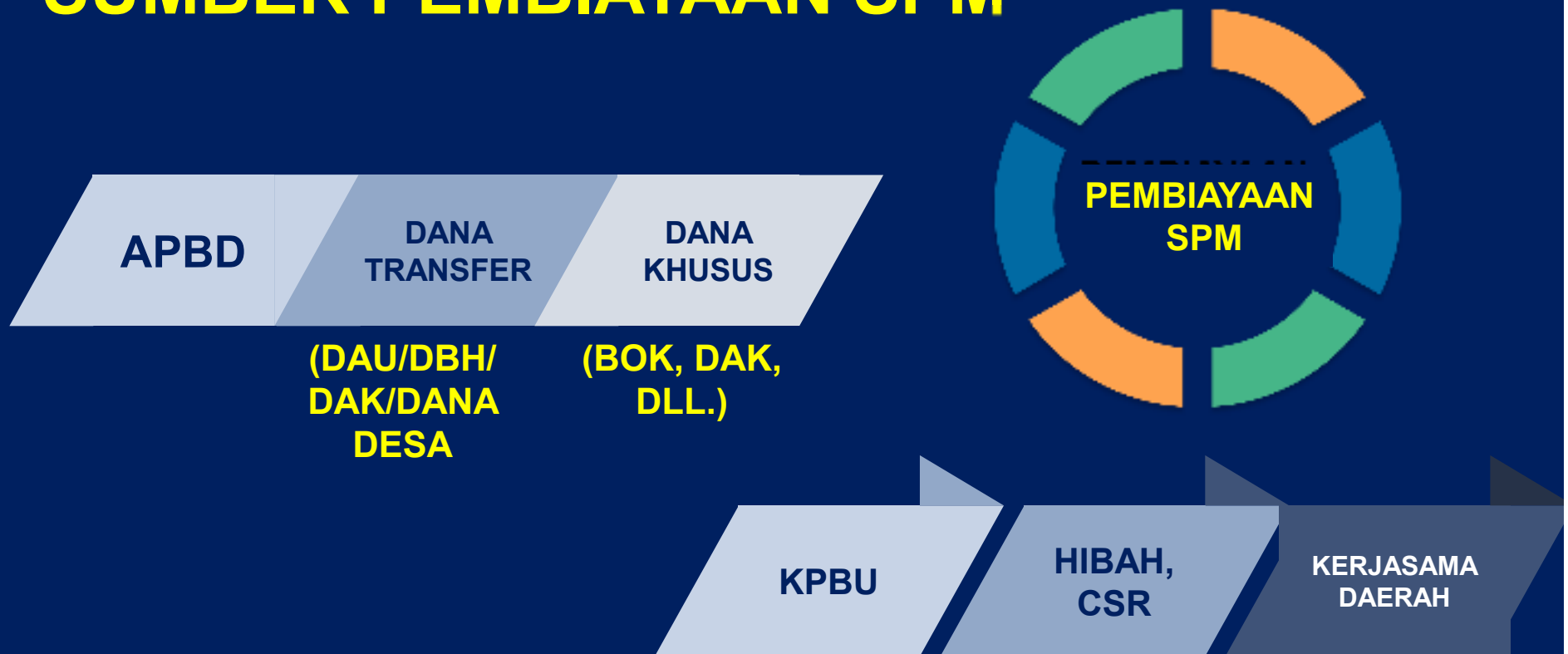
Lanjutan....

					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ Kegiatan
					KABUPATEN/KOTA
					SPM BIDANG KESEHATAN
01	02				KESEHATAN
01	02	xx	01		PROGRAM UKM RUJUKAN
01	02	xx	01	1	Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan ibu hamil
01	02	xx	01	2	Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan ibu bersalin
01	02	xx	01	3	Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan bayi baru lahir
01	02	xx	01	4	Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan balita
01	02	xx	01	5	Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia pendidikan dasar
01	02	xx	01	6	Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia produktif
01	02	xx	01	7	Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia lanjut
01	02	xx	01	8	Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan penderita hipertensi
01	02	xx	01	9	Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan penderita diabetes melitus
01	02	xx	01	10	Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
01	02	xx	01	11	Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang terduga tuberkulosis
01	02	xx	01	12	Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
					PROGRAM Dst.....

ALUR PENGANGGARAN SPM KESEHATAN



SUMBER PEMBIAYAAN SPM



PEMBIAYAAN SPM BIDANG KESEHATAN KHUSUSNYA 5 FOKUS PRIORITAS

- Pengumpulan Data
- **Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar**
- Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
- Pelaksanaan Pemenuhan

**Permendagri
No.100/ 2018 (Psl 4)
Penerapan SPM**

**Permenkes
No.4/2019 (Psl 5)**

- **Perhitungan Pembiayaan Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan memperhatikan: Sumber Pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi Anggaran**

- Untuk mempermudah penghitungan pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di daerah Diperlukan: **Sistem Informasi dalam perencanaan pelaksanaannya.**

Tools Costing SPM Kesehatan

“Perhitungan pembiayaan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran serta mapping

FUNGSI TOOLS SISCOBIKES (COSTING SPM)

1. Memberikan kemudahan kepada Pemda dalam penyusunan dan perencanaan anggaran
2. Memberikan standarisasi kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak pemda terkait penerapan SPM Kesehatan
3. Mengetahui besaran kebutuhan anggaran dalam penerapan SPM Kesehatan
4. Sebagai bahan evaluasi akan indikator kinerja kepala daerah.
5. Mengetahui apakah program prioritas sudah mendapat alokasi pembiayaan yang cukup.

ALUR SISCOSBIKES SPM KESEHATAN

1. Pengisian Tools Costing
2. Hasil Perhitungan (Ms.excel)
3. Upload ke Website Siscobikes
4. Download Rekapitulasi Hasil Perhitungan by Kab/Kota/Propinsi



Template Ms. Excel sesuai format Perhitungan Permenkes No 4 Tahun 2019



Tersedia fitur melihat, menganalisa, mengevaluasi data antara waktu dan antar daerah



Bahan evaluasi kinerja dan penyerapan bagi Kab/Kota/ Propinsi dan Pusat

DILENGKAPI DENGAN :

1. Petunjuk Teknis Pengisian Tools dan Tata Kelola Upload
2. Petunjuk Teknis Penggunaan dan Analisis hasil SPM pada Website

CONTOH HASIL PERHITUNGAN TOTAL COST SPM

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

C11 PivotTable1

Rekapitulasi TABEL HASIL PEMBIAYAAN PROGRAM SPM

Tabel 1a. Total Anggaran Kegiatan SPM menurut Jenis Kegiatan, tahun, dan target lima tahun di tingkat kab/kota

Unit cost

	Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2018
1. Ibu hamil		165,000,000	184,078,129	204,651,563	226,522,148	250,698,164	100,487
10. ODGJ		510,000,000	568,968,750	632,559,375	701,085,641	774,885,234	36,727
11. TB		510,000,000	558,131,250	608,691,375	661,782,789	717,511,806	53,090
12. HIV		690,000,000	755,118,750	823,523,625	895,353,186	970,751,349	248,445
2. Ibu Bersalin		210,000,000	229,818,750	250,637,625	272,498,796	295,446,063	130,502
3. Bayi baru Lahir		225,000,000	348,348,214	376,216,071	405,059,304	434,905,779	221,942
4. Balita		195,000,000	301,901,786	326,063,929	351,051,396	376,918,341	37,730
5. Pendidikan dasar		120,000,000	185,785,714	200,648,571	216,031,629	231,949,749	6,173
6. Usia Produktif		210,000,000	325,125,000	351,135,000	378,065,350	405,912,060	4,482
7. Usia Lanjut		135,000,000	209,008,929	225,729,643	243,035,582	260,943,467	24,599
8. Hipertensi		90,000,000	91,622,093	99,921,977	108,637,394	117,785,806	4,522
9. Diabetes Mellitus		120,000,000	130,050,000	140,454,000	151,227,140	162,364,624	5,185
Total		3,180,000,000	3,887,957,361	4,240,222,754	4,610,636,354	5,000,072,701	72,990

Tabel 1b. Total Anggaran Kegiatan SPM menurut Jenis Kegiatan, tahun, target lima tahun dan inflasi di tingkat kab/kota

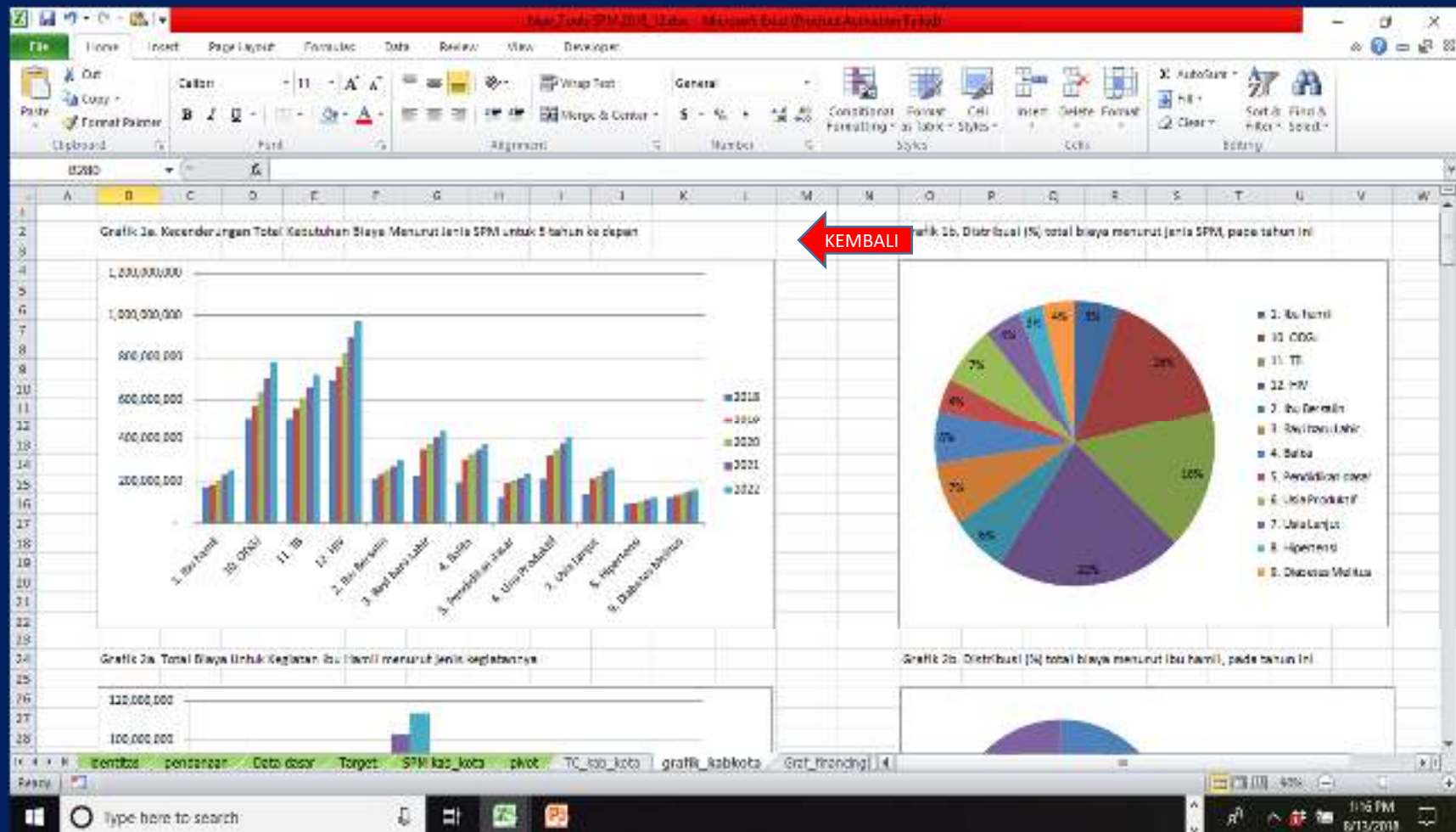
	Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
1. Ibu hamil		165,000,000	189,600,469	210,791,109	233,625,813	258,219,109
10. ODGJ		510,000,000	586,037,813	651,536,156	722,119,240	798,131,791

Ready

Type here to search

1:12 PM 8/13/2018

CONTOH DISPLAY HASIL PERHITUNGAN GRAFIK KAB/KOTA





TERIMA KASIH

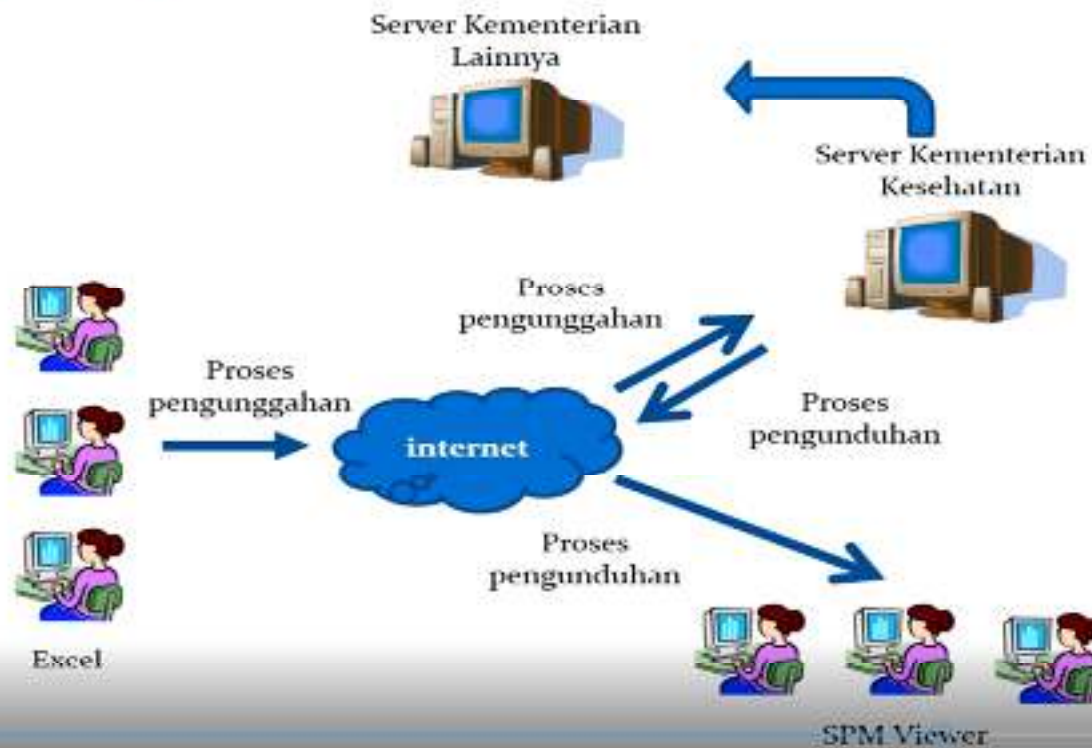
MUATAN MATERI PERMENKES SPM BIDANG KESEHATAN

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan	Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
a. Barang b. Jumlah c. Fungsi	Jenis Tenaga Kesehatan	a. Pernyataan Standar b. Pengertian c. Mekanisme Pelayanan d. Capaian Kinerja e. Teknik Penghitungan Pembiayaan



PRINSIP KERJA

Prinsip Kerja SISCOBIKES



MENGUNAKAN SPM & SISCOBIKES DALAM PERENCANAAN APBD

